

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dinamika dan gairah kehidupan politik terutama menjelang dan selama berlangsungnya Pemilihan Umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden pada kenyataannya tetap mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pemilu sendiri telah berlangsung aman dan lancar, dan telah memberi kontribusi berarti bagi proses pembelajaran masyarakat mencapai kedewasaan berpolitik. Dengan kondisi seperti ini, upaya untuk melanjutkan pemulihan ekonomi, perbaikan kesejahteraan dan kehidupan sosial baik diupayakan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat sendiri dapat terus berlangsung secara baik dan produktif di tahun 2005

Dalam lingkup nasional, paling tidak ada 4 hal utama yang perlu dipahami secara seksama, dan diyakini berpengaruh pada kebijakan daerah tahun 2005: (1) terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2004-2009 serta agenda program kabinet baru hasil Pemilu 2004, (2) diterapkannya perubahan sistem APBN dari *Dual Budgeting* kepada *Unified Budgeting* dan dari *Cost-based* kepada *Performance-based* mulai tahun 2005, (3) otonomi daerah yang dalam implementasinya masih belum memiliki persamaan persepsi, baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah sendiri, karena itu perlu penataan kembali kewenangan pusat, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan (4) pemulihan ekonomi yang masih harus terus dilanjutkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Sementara itu dalam lingkup nasional juga terdapat 3 (tiga) agenda pembangunan nasional untuk tahun 2005: (1) mempercepat reformasi, (2) meningkatkan kesejahteraan rakyat serta (3) memperkuat kesatuan dan

persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agenda nasional diatas sedikit banyak juga akan berpengaruh pada agenda-agenda di daerah, khususnya dalam menetapkan program-program daerah serta pengelolaan APBD yang lebih tepat, terarah dan optimal. Pada dasarnya kebijakan dan program daerah sepatutnya mampu mendukung dan konsisten dengan kebijakan nasional.

Upaya perbaikan dan pemulihan yang dilakukan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah mampu menciptakan kembali berbagai aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini tidak terlepas dari adanya kondisi keamanan dan stabilitas yang semakin baik. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan dengan tujuan agar masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupannya serta dapat berkarya nyata dalam membangun kotanya. Tidak dapat dipungkiri, di dalam melakukan pembenahan ditemukan sejumlah masalah baik yang bersifat lokal maupun nasional.

Bila diikuti perkembangannya, pembangunan kota yang pada tahap awalnya hanya ditekankan pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah, sekarang ini mulai bergeser pada upaya-upaya yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial dan lingkungan/ruang publik. Proses perencanaanpun dilakukan secara lebih partisipatif, mengikuti paradigma baru pembangunan yang lebih melibatkan peranserta masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan proses yang lebih partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga mendorong tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat.

Secara umum kondisi masyarakat DKI Jakarta telah menunjukkan banyak kemajuan. Konflik-konflik horizontal antar masyarakat dirasakan sudah jauh berkurang begitu pula tawuran antar pelajar, artinya kuantitasnya sudah

jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di bidang politik, tuntutan masyarakat luas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik serta hak mengeluarkan pendapat dan menyalurkan aspirasi mulai terakomodasi secara baik. Untuk itu dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat luas melalui forum-forum kajian dan perencanaan hingga tingkat Rukun Warga (RW).

Di bidang hukum, penegakan supremasi hukum walaupun masih mengalami banyak kendala namun sudah menunjukkan perubahan mendasar, misalnya dilakukannya tindakan hukum atas pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Dukungan hukum juga diperlukan bagi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan dalam rangka melakukan terobosan-terobosan ke arah kinerja yang lebih baik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. Penempatan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah sesuai profesi dan kompetensinya, pengelolaan keuangan daerah yang transparan, serta pengembangan kapasitas anggota legislatif daerah merupakan beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju tata pemerintahan yang bersih.

Kondisi perekonomian DKI Jakarta juga telah memasuki tahap pemulihan, yang lebih mantap, ditandai dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Rp 189,12 triliun (seratus delapan puluh sembilan trilyun seratus dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2000 menjadi Rp 312,98 triliun (tiga ratus dua belas triliun sembilan ratus delapan puluh milyar rupiah) pada tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi meningkat cukup baik, mencapai 4,70 persen pada tahun 2004. Di sisi lain, tingkat inflasi berhasil ditekan menjadi 6,50 persen pada tahun 2004 yang sebelumnya sempat mencapai 2 digit pada tahun 2000 dan 2001. Dengan kondisi tersebut dapat dikatakan stabilitas ekonomi cukup baik dengan trend yang terus meningkat.

Berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Indikator kinerja pembangunan terkait

dengan kependudukan, pendidikan, dan kesehatan terus menunjukkan peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta menurun dari tahun ke tahun walaupun sebagai kota metropolitan tingkat densitas penduduk masih tinggi dibanding Propinsi lain. Dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,37 persen per tahun. Upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat juga menunjukkan hasil yang lebih baik, tercermin dari menurunnya angka kematian bayi dari 21 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2001 menjadi 18 per seribu kelahiran pada tahun 2004. Begitu pula angka harapan hidup meningkat dari 72 tahun menjadi 73 tahun. Bidang pendidikan pun tidak terlepas dari perhatian pemerintah dengan tetap memperjuangkan penerapan wajib belajar 9 tahun terutama bagi penduduk kurang mampu. Angka Partisipasi Sekolah (APS), untuk usia 7-12 tahun telah mencapai 98,40 persen pada tahun 2004, sedangkan usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun masing-masing mencapai 92,30 dan 71,80 persen. Diperkirakan untuk dua tahun ke depan APS usia 7-12 dapat mencapai 100 persen. Pembangunan bidang SDM yang juga penting adalah pembinaan kehidupan beragama seluruh penduduk Jakarta. Dalam kenyataannya kehidupan dan kerukunan hidup beragama terus berkembang dan berjalan dengan baik dan harmonis.

Meskipun kehidupan masyarakat DKI Jakarta berada pada kondisi yang lebih baik, namun diakui masih banyak persoalan yang dihadapi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam membangun daerah, mulai dari persoalan penduduk dan dinamikanya, pemukiman liar, pemusatan kegiatan ekonomi secara berlebihan di sejumlah titik, hingga persoalan lingkungan hidup. Hal ini memberikan dampak pada berkurangnya daya dukung lahan dan lingkungan serta pelayanan masyarakat dalam hal pemukiman, kegiatan ekonomi, ruang publik, hingga perbaikan sistem transportasi massal. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi Jakarta saat ini dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal. Beberapa tantangan internal adalah (a) bagaimana memenuhi kualitas pelayanan publik yang lebih baik, (b) bagaimana mengatur ruang yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan ruang publik, (c) bagaimana mewujudkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata

pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi adalah: (a) bagaimana meningkatkan peranserta masyarakat dalam setiap proses pembangunan untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis antara pemerintah sebagai dinamisator dan regulator dengan masyarakat dan dunia usaha sebagai pelakunya, (b) bagaimana menjadikan Jakarta tetap aman dan menarik bagi investor, yang tentunya perlu didukung oleh keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang memadai, dan (c) bagaimana menciptakan kinerja terbaik dalam hubungan sinergis antara Pemerintah Propinsi dengan DPRD, dan antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Pusat.

Di samping persoalan di atas, peluang ke depan yang dapat dimanfaatkan Jakarta adalah (a) implementasi Otonomi Daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan upaya mengoptimalkan PAD dan kemandirian daerah secara lebih bertanggung jawab, (b) implementasi dari globalisasi dan perdagangan bebas ASEAN (AFTA 2003), dimana Jakarta harus siap untuk berkompetisi dengan kota-kota besar lain di dunia khususnya dalam hal ekspor, investasi, produktivitas dan lapangan kerja, (c) optimalisasi fungsi *service city* mengingat kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara, pusat kegiatan bisnis, pintu gerbang internasional dan barometer stabilitas nasional, dan (d) kerjasama antar daerah yang sinergik dan saling menguntungkan berdasarkan potensi dan kekuatan masing-masing berbasis mata rantai kegiatan produksi dan distribusi dengan peluang untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan jasa.

Dengan kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang di atas, diharapkan Jakarta tetap mampu memanfaatkan kedudukan dan peranannya untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu sebagai pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan di daerah khususnya dalam mengelola pembangunan dan pemerintahan, perlu dirumuskan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta tahun 2005 yang dituangkan

dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) tahun 2005.

## **B. Tujuan Penyusunan**

Repetada Propinsi DKI Jakarta tahun 2005 dirumuskan dan disusun sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam mengelola APBD DKI Jakarta, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 8 tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Repetada yang dibahas dan disepakati bersama DPRD ini akan menjadi dasar bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran untuk satuan kerja masing-masing.

Repetada tahun 2005 memuat enam substansi materi yaitu: (1) Visi dan Misi Pembangunan Propinsi DKI Jakarta, (2) Muatan dan Proses Penyusunan Repetada Tahun 2005, (3) Tantangan dan Prospek APBD 2005, (4) Kebijakan Umum APBD 2005, (5) Prioritas APBD 2005, dan (6) Plafon APBD 2005. Disamping keenam substansi materi di atas, dilampirkan pula matriks indikator sosial-ekonomi DKI Jakarta 2000-2005, sebagai pedoman pencapaian kinerja makro untuk tahun 2005.

Dalam menyusun Repetada tahun 2005 ini, prinsip-prinsip serta mekanisme penyusunan menjadi bagian penting yaitu (1) melibatkan sejauh mungkin partisipasi masyarakat (*public participation*) dalam aspirasi dan aksi melalui forum-forum kajian dan perencanaan yang dilaksanakan secara partisipatif dan berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya sampai Propinsi, (2) berorientasi pada pemecahan masalah dan peka pada perkembangan fenomena terkini, (3) berorientasi pada pendekatan kinerja (*performance-based budgeting*), dan (4) berorientasi pada optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu pelayanan publik, percepatan

pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta stimulus pertumbuhan ekonomi

Selanjutnya untuk menjaga kesinambungan kegiatan antar waktu serta dalam upaya mensukseskan program-program jangka menengah lima tahunan maka Repetada tahun 2005 ini harus tetap berada dalam kerangka Program Pembangunan Daerah (Propeda) DKI Jakarta 2002-2007, Rencana Strategis Daerah (Renstrada) DKI Jakarta 2002-2007, Repetada DKI Jakarta 2004 serta dokumen perencanaan lainnya yang relevan dan masih berlaku.

Perlu dipahami bahwa penyusunan Repetada Propinsi DKI Jakarta tahun 2005 ini merupakan penyusunan kedua kali setelah keluarnya Undang-Undang No. 17 tahun 2003.

### **C. Landasan Hukum**

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Propinsi DKI Jakarta Tahun 2005 disusun berlandaskan pada:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002 – 2007

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002 – 2007

#### **D. Kerangka Penyusunan**

Penyusunan Repetada tahun 2005 dibagi menjadi 7 Bab dan beberapa subbab sebagai berikut:

- Bab I.      Pendahuluan
  - A.   Latar Belakang
  - B.   Tujuan Penyusunan
  - C.   Landasan Hukum
  - D.   Kerangka Penyusunan
  
- Bab II.     Visi dan Misi Pembangunan Daerah
  - A.   Visi
  - B.   Misi
  
- Bab III.    Muatan dan Proses Penyusunan Repetada Tahun 2005
  - A.   Kebijakan Umum APBD
  - B.   Prioritas APBD
  - C.   Plafon APBD
  
- Bab IV.     Tantangan dan Masalah serta Prospek APBD 2005
  - A.   Tantangan dan Masalah
  - B.   DKI Jakarta Dalam Perspektif Nasional
  - C.   Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2004
  - D.   Prospek APBD Tahun 2005
  
- Bab V.      Kebijakan Umum APBD 2005
  - A.   Arah Kebijakan
  - B.   Kebijakan Pendapatan Daerah
  - C.   Kebijakan Belanja Daerah
  - D.   Kebijakan Pembiayaan Daerah

Bab VI. Prioritas APBD 2005

- A. Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa
- B. Bidang Pemerintahan
- C. Bidang Ekonomi
- D. Bidang Pendidikan dan Kesehatan
- E. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- F. Bidang Sosial Budaya
- G. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- H. Bidang Sarana dan Prasarana Kota

Bab VII. Plafon APBD 2005

- A. Pendapatan Daerah
- B. Belanja Daerah
- C. Pembiayaan Daerah

Bab VI. Penutup

Selain itu pada bagian akhir Repetada tahun 2005 ini dilampirkan matriks indikator ekonomi dan sosial Propinsi DKI Jakarta tahun 2000-2005 serta laju pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta tahun 2000-2005 menurut sektor.